

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar
- Dewi Asri Yustia. (2022). *Asas Legalitas Hukum Pidana Studi Kasus Pelanggaran Kesusilaan Dalam Perda*. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. Depok
- Edward Omar Sharif Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustajka, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T. (2014). *Sejarah Hukum di Indonesia*. Pustaka Pena. Jakarta
- Lamintang, P.A.F. (2012). *Buku Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- M. Yuanda Zara. (2009). *Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Nasution, A.H. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3: Diplomasi Sambil Bertempur, DISJARAH AD dan Penerbit ANGKAS*, Bandung
- Sudarto. (1974) *Hukum Pidana Jilid 1A, Bagian Penerbitan, dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang*.
- Pramoedya Ananta Toer & Koesalah Soebagyo Toer. (2003). *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV (1948)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- T. Subarsyah Sumadikara. (2009). *Kejahatan Politik (Kajian Dalam Prespektif Kejahatan Sempurna)*. Kencana Utama. Bandung
- Sumaryo Suryokusumo. (2010). *Hukum Pidana Internasional*. Tatanusa, Jakarta
- Suryawati, N. (2010). *Buku Hak Asasi Politik Perempuan*. Repositori UKDC, 11–15. [http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku Hak Asasi Politik Perempuan-Bab II.pdf](http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku_Hak_Asasi_Politik_Perempuan-Bab_II.pdf)
- Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In *Perpustakaan Nasional*.

Wirjono Prodjodikoro. (1969). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung

Sumber Jurnal:

A.A Ngurah, O., & Yudistira, D. (2013). Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan Kuhp. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 442-12.

Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia. *Penafsiran Hukum*, 6(11), 35.

Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>

Apriani, L. R., Hukum, F., Pancasila, U., Srengseng, J., & Jakarta, S. (2008). *Penerapan filsafat pidana dalam tindak pidana korupsi*. 01, 1–14.

Bahagiati, K. (2020). Filsafat Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 114–140. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9810>

Bakhri, S. (2011). Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 136–157. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>

Dahwir, A. (2020). Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017. *Solusi*, 18(2), 265–282. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.291>

Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*.

Endri. (2014). PENANGGULANGAN KEJAHATAN PIDANA POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU). *Jurnal Selat*, 1(2), 110–119.

Febriansyah, I. (2017). *KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS BANGSA*. 13, 1–27.

Hardiogo, D. (2021). Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 908. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859>

Hartin, N. S., & Nathalia. (2019). URGENSI PIDANA TUTUPAN: HARAPAN DAN TANTANGAN Nadia. *Ilmiah Hukum*, 4(September), 282–298.

Hasanuddin, I. (2002). *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls Iqbal Hasanuddin Universitas Bina Nusantara*. 193–204.

Hikmawati, P. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat

- Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol 7(No.1), 71–88. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>
- Imam, T. A. (2018). Asas equality before the law dalam hukum positif ditinjau menurut hukum pidana islam. In *Jurnal Bina Praja*.
- Irmawanti, N. D., Arief, B. N., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. 3, 217–227.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv.
- Peristiwa 3 Juli 1946, (1995).
- Moeliono, T. P. (2019). *KUHP Belanda dan KUHP Indonesia*.
- Mudzakkir, T. K. B. (2008). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan). *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–117. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
- Muklhis R. (2018). Pemahaman Masyarakat Riau Dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan. *Masalah-Masalah HUKUM*, 47(2), 149–156.
- Nasrullah. (2019). Kajian yuridis pidana tutupan prespektif Hermeneutika Double Movement. *Legal Spirit*, 3(April), 49–58.
- Nasution, B. J. (2014). *KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN*. 3(2).
- Prasetyo, Y. (2020). *Analisis Yuridis Filosofis Terhadap Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah*. 3(1), 98–108.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>
- Rachman, T. (2018). Kebijakan Hukum Tindak Pidana. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Risky, A. (2022).

- Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana Development of. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188. Hal. 180.
- Rohromana, B. (2007). Kejahatan Politik Dalam Prespektif Kebijakan Kriminal Indonesia. *Media Hukum*, 14(3).
- Septiani Rahayu, T. (2014). PEMBERLAKUAN KEMBALI SANKSI PIDANA TUTUPAN DALAM RANCANGAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. In *Universitas Pasundan* (Vol. 3, Issue 2). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Siahaan, H. (2018). Tindak pidana terhadap keamanan negara dalam perspektif delik politik di indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 16(3), 31–36.
- Subarsyah, T. S. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BIDANG POLITIK DI INDONESIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA T. *Litigasi Unpas*, 15(2), 2539–2583.
- Suryawati, N. (2010). Buku Hak Asasi Politik Perempuan. *Repositori UKDC*, 11–15. [http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku Hak Asasi Politik Perempuan-Bab II.pdf](http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku_Hak_Asasi_Politik_Perempuan-Bab_II.pdf)
- Taufik, M. (2013). *Jurnal Studi Mukaddimah*. 19(1).
- Thamariskha, N. (2022). *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before the Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun*.
- Ulfah, M. (2019). Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019 Sub tema Tulisan : Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS “ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial Dalam RKUHP,”* 247–270.
- Usman. (2002). ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA. *Ilmu Hukum*, 23, 167.
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.
- Widayati, L. S. (2019). Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai? Undisclosed Penitentier in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment’s Perspective, Can It Be Achieved? *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(2), 237–257.
- PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN TERDUGA TINDAK PIDANA

(ANALISA PUT. MK. NO. 76/PUU-XII/2014), 208 (2016).

Sumber Undang-Undang:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional

Sumber Lain:

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN TERDUGA TINDAK PIDANA (ANALISA PUT. MK. NO. 76/PUU-XII/2014), 208 (2016)

<https://business-law.binus.ac.id/2016/04/18/niat-jahat/>